

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam hubungan internasional, setiap negara akan saling membutuhkan negara lain. Hal ini dikenal sebagai isu interdependensi yang diartikan sebagai hubungan saling ketergantungan. Ketergantungan antarnegara makin erat sejalan dengan semakin banyaknya aktor negara maupun non negara yang membangun kerja sama. Kerja sama antarnegara juga mulai merambah pada kebutuhan dalam bantuan luar negeri. <sup>1</sup>Menurut Carol Lancaster dalam *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*, bantuan luar negeri merupakan transfer sukarela dari pemerintah kepada pemerintah maupun dari pemerintah untuk lembaga.<sup>2</sup> Tujuan dari bantuan luar negeri adalah untuk memperbaiki kondisi manusia di negara penerima bantuan.<sup>3</sup>

Bantuan luar negeri merupakan fenomena yang sangat dinamis hingga saat ini. Dari awal implementasinya sejak pasca-Perang Dunia II, isu yang mengiringi terus bergerak dan tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik internasional yang terjadi. Hal yang paling mempengaruhi isu bantuan luar negeri dewasa ini adalah tujuan pembangunan (*development goals*) yang dirumuskan oleh donor-donor internasional.

---

<sup>1</sup> Annisa Huda Muya Jannah. *Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat Melalui United States Agency For International Development (USAID) Pada Bencana Alam Di Filipina*. (Skripsi: Universitas Jember). 2012.

<sup>2</sup> Carol Lancaster. *Foreign Aid; Diplomacy, Development, Domestic Politics*. (London: University of Chicago Press. 2007).

<sup>3</sup> Ibid.

*Development goals* menjadi acuan negara-negara donor dalam memformulasikan program-program bantuan yang akan disalurkan.<sup>4</sup>

Salah satu negara yang dikenal aktif dalam memberikan bantuan luar negeri adalah Amerika Serikat.<sup>5</sup> Bantuan luar negeri yang diberikan Amerika Serikat dapat berbentuk bantuan pembangunan, bantuan militer, bahkan bantuan kemanusiaan pada negara yang mengalami krisis atau bencana. Awal terjadinya proses pemberian bantuan luar negeri serta terbentuknya lembaga bantuan Amerika Serikat tidak terlepas dari sejarah Marshall Plan.<sup>6</sup> Program ini dirancang untuk merehabilitasi perekonomian 17 negara barat dan selatan Eropa dalam rangka menciptakan kondisi yang stabil.<sup>7</sup> Amerika Serikat khawatir bahwa kemiskinan, pengangguran, dan permasalahan lain akibat Perang Dunia II menjadikan masyarakat dunia tertarik kepada partai komunis di Eropa Barat. Melihat kesuksesan Marshall Plan pada tahun 1949, program bantuan teknis dan proyek-proyek moral dilanjutkan sebagai bentuk utama dari bantuan Amerika Serikat dan merupakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

*Peace Corps* merupakan suatu agen bantuan pembangunan Amerika Serikat untuk negara-negara dunia ketiga dalam agrikultur, pendidikan, kesehatan,

---

<sup>4</sup>John Degnbol Martinussen dan Endberg Pedersen. *Understanding International Development Cooperation*. (London: Zed Books Ltd. 2003). hal 25.

<sup>5</sup> <https://www.washingtonpost.com/graphics/world/which-countries-get-the-most-foreign-aid/> (diakses tanggal 10 April 2017).

<sup>6</sup> Harry Bayard Price. *The Marshall Plan & Its Meaning*. (New York: Cornell University Press Ithaca. 1955).

<sup>7</sup> Ibid.

pembangunan ekonomi masyarakat, lingkungan dan pembangunan pemuda.<sup>8</sup>

Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1961 oleh Presiden John F. Kennedy, *Peace Corps* memiliki tujuan untuk:<sup>9</sup>

1. Membantu warga dari negara yang berminat untuk memenuhi kebutuhan mereka akan tenaga terampil baik laki-laki maupun perempuan;
2. Membantu memperdalam pemahaman warga penerima bantuan tentang masyarakat Amerika Serikat;
3. Membantu memperdalam pemahaman warga Amerika Serikat tentang bangsa lain.

*Peace Corps* berbeda dengan *Agency of International Development, U.S. Red Cross Junior, Chamber of Commerce* atau badan bantuan lainnya. *Peace Corps* berbentuk badan independen yang terdiri dari sukarelawan yang berasal dari latar belakang ras, jenis kelamin, umur dan pekerjaan yang berbeda untuk disebarluaskan hingga ke seluruh dunia.<sup>10</sup> Sukarelawan *Peace Corps* menggunakan waktu dan kemampuan mereka dengan bekerja sama selama dua tahun sebagai guru, penasehat usaha, konsultan teknologi dan informasi, kesehatan, penyuluhan HIV/AIDS, serta pekerja pertanian.<sup>11</sup> Mereka juga belajar meleburkan diri mereka ke dalam budaya negara tempat mereka bekerja serta berpartisipasi dalam proyek dan aktivitas

---

<sup>8</sup> Tentang *Peace Corps*. <http://www.peacecorps.gov?index.cfm?shell=about> (diakses tanggal 2 November 2016).

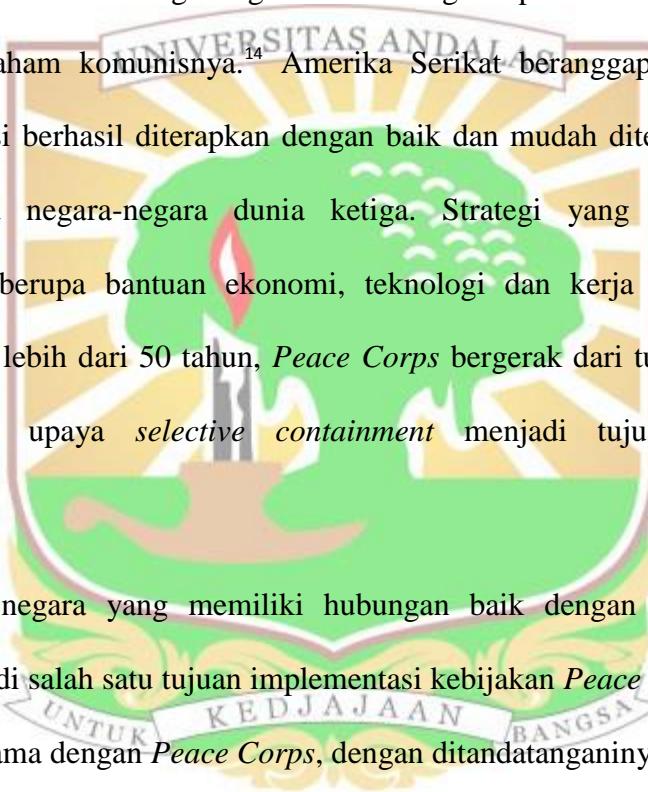
<sup>9</sup> *The Peace Corps. A Comprehensive Agency Assessment* (Peace Corps, Washington). 2010.

<sup>10</sup> Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, *Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia Tahun 2015*, 2015.

<sup>11</sup> *Peace Corps Indonesia. Laporan Tahunan 2012.* (Peace Corps Indonesia: Surabaya). 2012.

pembangunan dan pelayanan yang dirancang untuk masyarakat.<sup>12</sup> Hingga saat ini *Peace Corps* telah tersebar di 140 negara dengan jumlah relawan lebih dari 220.000 orang.<sup>13</sup>

Pada awal pembentukannya *Peace Corps* merupakan implementasi strategi *selective containment* yang dirancang oleh Presiden John F. Kennedy sebagai misi perdamaian pada masa Perang Dingin untuk menghadapi kekuatan Uni Soviet dan membendung paham komunisnya.<sup>14</sup> Amerika Serikat beranggapan bahwa paham liberal demokrasi berhasil diterapkan dengan baik dan mudah diterapkan di seluruh dunia, terutama negara-negara dunia ketiga. Strategi yang digunakan untuk pembendungan berupa bantuan ekonomi, teknologi dan kerja sama pertahanan. Setelah berjalan lebih dari 50 tahun, *Peace Corps* bergerak dari tujuan bantuan luar negerinya, dari upaya *selective containment* menjadi tujuan pembangunan internasional.



Sebagai negara yang memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, Indonesia menjadi salah satu tujuan implementasi kebijakan *Peace Corps*.<sup>15</sup> Indonesia menjalin kerja sama dengan *Peace Corps*, dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* pada tanggal 8 Maret 1963 dan mulai dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1963 (*Peace Corps* Tahap I).<sup>16</sup> Indonesia pada saat tersebut menjalin kerja

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Fast Facts. <https://www.peacecorps.gov/news/fast-facts> (diakses tanggal 2 November 2016).

<sup>14</sup> John F Kennedy. *Strategy of Peace*. (New York: Harper&Brother. 1960).

<sup>15</sup> <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/RI-AS-Sepakati-Kerjasama-i-Peace-Corps-i-dan-i-Interfaith-Dialogue-i.aspx> (diakses tanggal 10 April 2017)

<sup>16</sup> Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas. *Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia Tahun 2015*. (Bappenas: Jakarta). 2015.

sama ini atas permintaan untuk memberi pelatihan bidang olahraga dan pendidikan fisik.<sup>17</sup> Tiga tahun *Peace Corps* dijalankan di Indonesia, pada tahun 1965 bantuan pembangunan dihentikan karena politik Indonesia sedang tidak stabil.<sup>18</sup>

Setelah lebih dari 40 tahun pemutusan kerja sama *Peace Corps* dengan Indonesia, pada tanggal 16 Oktober 2006, Pemerintah Amerika Serikat, melalui Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, mengadakan pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang kembali menyampaikan tawaran bantuan pembangunan di Indonesia.<sup>19</sup> Melalui surat Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 6461/M.PPN/10/2006 kepada Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta dan surat No. 6463/M.PPN/10/2006 tanggal 31 Oktober 2006, pemerintah Indonesia telah menyampaikan penghargaan dan membuka diri terhadap kerja sama internasional sekaligus mengundang *Peace Corps* untuk membangun kembali programnya di Indonesia.<sup>20</sup>

*Memorandum of Understanding (MoU) Peace Corps* akhirnya ditandatangani kembali pada tanggal 11 Desember 2009 (*Peace Corps* Tahap II).<sup>21</sup> Pencapaian ini merupakan hasil dari perkembangan penting hubungan bilateral Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Amerika Serikat di bawah

---

<sup>17</sup> Rekso Graha & Suzie Sudarman. "Program *Peace Corps*: Implementasi *Smart Power* Pemerintah Amerika Serikat di Indonesia". *Jurnal Prisma* Vol. 35, No. 1 (2016).

<sup>18</sup> <http://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20141006/282424167459426> (diakses tanggal 10 April 2017).

<sup>19</sup> Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas. *Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Program *Peace Corps* di Indonesia Tahun 2015*. (Bappenas: Jakarta). 2015.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Memorandum of Understanding. [http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/1304\\_USA-2009-0301.pdf](http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/1304_USA-2009-0301.pdf) (diakses tanggal 23 November 2016)

kepemimpinan Barrack Obama yang ditandai dengan disepakatinya *Comprehensive Partnership* pada bulan November 2010.

Implementasi program ditandai dengan kedatangan 18 relawan pertama untuk mengajar Bahasa Inggris di sekolah dan madrasah di bawah Kementerian Agama.<sup>22</sup> Selanjutnya, 200 relawan *Peace Corps* bertugas di Indonesia sampai tahun 2015. Awalnya Relawan *Peace Corps* ditempatkan di Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2012 *Peace Corps* memperluas kehadirannya ke Provinsi Jawa Barat.

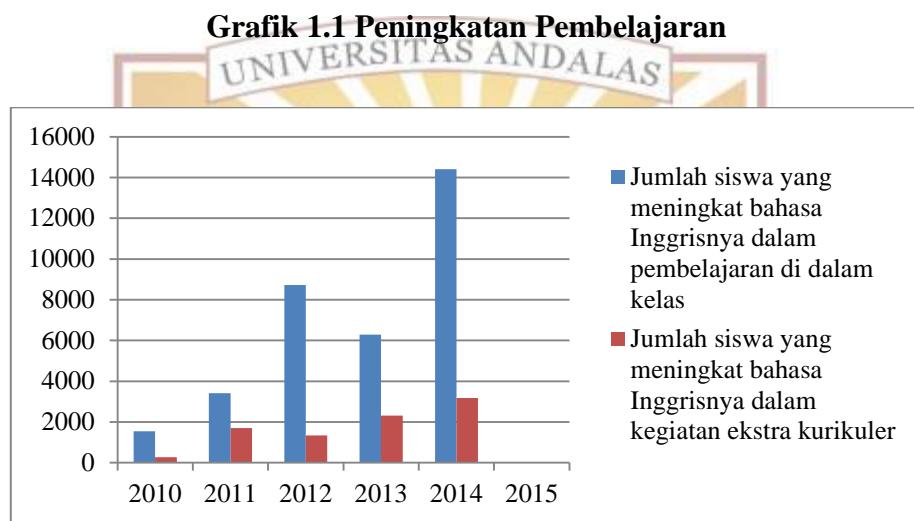


Bantuan pembangunan *Peace Corps* di Indonesia terdiri dari berbagai macam program dalam sosial kemasyarakatan namun fokus dalam bidang pendidikan khususnya pengajaran Bahasa Inggris di SMA/MA/SMK, berbeda dengan Timor Leste yang fokus pada bidang *Community Economic Development* atau Ghana yang fokus pada bidang *agriculture, education* dan *health*. Pemerintah menyadari pentingnya Bahasa Inggris dan menganggap bahwa bahasa tersebut perlu diajarkan kepada para siswa sekolah lanjutan. Meskipun pengajaran Bahasa Inggris telah lama dilaksanakan dan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas pengajaran tersebut telah diupayakan, tetapi hasil yang dicapai belum memenuhi harapan sebagaimana tertera dalam keputusan menteri di atas. Laporan *EF English Proficiency Index (EPI)* 2016 mencatat kemampuan berbahasa Inggris masyarakat Indonesia memiliki skor 52,94 dengan level menengah dan berada pada peringkat ke-32 dari 72 negara yang

<sup>22</sup> <http://www.voaindonesia.com/a/peace-corps-tandai-setahun-kembali-ke-indonesia-117867029/90827.html> (diakses tanggal 2 Januari 2017)

disurvei secara global. Indonesia juga hanya meraih peringkat ke-8 Asia di bawah Vietnam.<sup>23</sup>

*Peace Corps* melihat pentingnya kegiatan yang bisa meningkatkan pengajaran Bahasa Inggris baik di dalam maupun di luar kelas. Berikut data pencapaian bantuan pembangunan.



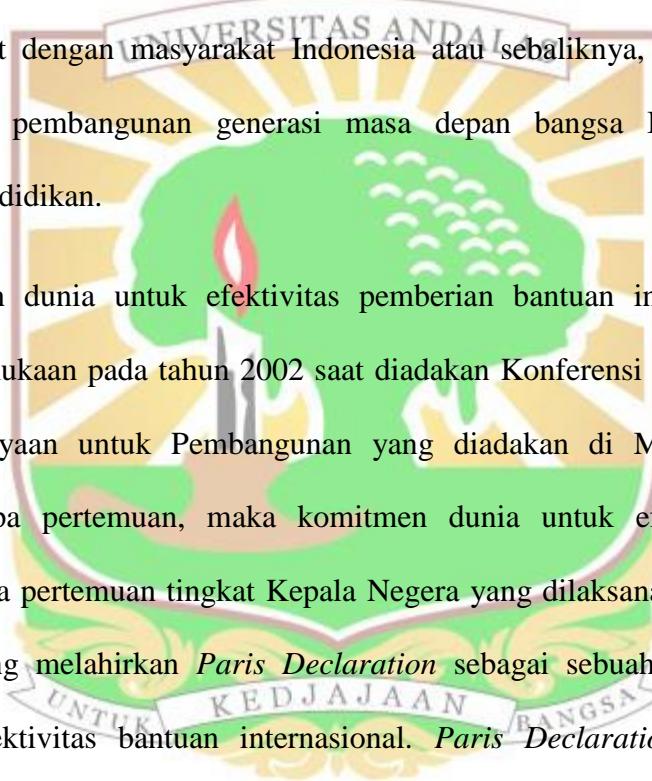
Sumber: *Peace Corps* Indonesia. Laporan Tahunan 2014.

Grafik 1.1 memperlihatkan peningkatan pembelajaran Bahasa Inggris. Dilihat dari tahun 2010 sebagai tahun pertama implementasi kegiatan, terdapat 1.535 siswa yang kemampuan Bahasa Inggrisnya meningkat di dalam kelas dan 263 siswa yang kemampuan Bahasa Inggrisnya meningkat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sampai ke tahun 2014 dengan 14.414 siswa yang kemampuan Bahasa Inggrisnya meningkat di dalam kelas dan 3.170 siswa yang kemampuan Bahasa Inggrisnya meningkat dalam

<sup>23</sup> The World's Largest Ranking of English Skills, <http://www.ef.co.id/epi/>, diakses tanggal 13 April 2017

kegiatan ekstrakurikuler. Terlihat peningkatan yang signifikan yang membuat *Peace Corps* masih diimplementasikan di Indonesia.

Enam tahun *Peace Corps* di Indonesia menunjukkan keberhasilan yang konsisten dalam pemberian bantuan pembangunan. Dengan tujuan dan program-program *Peace Corps* di Indonesia, *Peace Corps* tidak hanya bertujuan untuk membangun pengertian yang lebih baik (*mutual understanding*) antara masyarakat Amerika Serikat dengan masyarakat Indonesia atau sebaliknya, tetapi juga untuk upaya bantuan pembangunan generasi masa depan bangsa Indonesia melalui peningkatan pendidikan.



Perhatian dunia untuk efektivitas pemberian bantuan internasional mulai muncul ke permukaan pada tahun 2002 saat diadakan Konferensi Internasional PBB tentang Pembiayaan untuk Pembangunan yang diadakan di Monterrey. Setelah melalui beberapa pertemuan, maka komitmen dunia untuk efektivitas bantuan dirumuskan pada pertemuan tingkat Kepala Negara yang dilaksanakan di Paris pada tahun 2005 yang melahirkan *Paris Declaration* sebagai sebuah komitmen untuk memastikan efektivitas bantuan internasional. *Paris Declaration* adalah bentuk komitmen pertama antara negara/lembaga donor dan negara mitra yang dengan jelas memformulasikan batasan-batasan dan indikator-indikator untuk efektivitas proyek bantuan luar negeri.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Bernard Wood, *Results of The Paris Declaration Evaluation*, Bernard Wood & Associates Ltd, Canada, 2013.

Kerja sama *Peace Corps* dan Indonesia dilandasi prinsip yang menekankan kesetaraan posisi dan manfaat yang diperoleh. Dari segi kesetaraan posisi, kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana telah dicantumkan dalam *Paris Declaration* dan *the Jakarta Commitment*. Dari aspek manfaat, selayaknya kedua belah pihak memperoleh manfaat yang bersifat resiprokal.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang dipaparkan, maka penting untuk melihat perubahan fokus implementasi *Peace Corps* Tahap I (1963-1965) menjadi *Peace Corps* Tahap II (2010-2015) serta melihat efektivitas bantuan pembangunan *Peace Corps* menggunakan *Paris Declaration*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Upaya pemberian bantuan luar negeri dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 1963 dengan memberikan bantuan teknis melalui bantuan pembangunan *Peace Corps*. *Peace Corps* dilaksanakan dengan mengirimkan sukarelawan untuk membantu negara dunia ketiga dalam sektor *agriculture, education, health, community economic development, environment* dan *youth in development*. Program ini pada awalnya dilakukan untuk membendung pengaruh Soviet sebagai sarana *selective containment*, namun tujuan tersebut dewasa ini berkembang setelah lebih dari 50 tahun *Peace Corps* berjalan dan berakhirnya kekuasaan Uni Soviet. Di Indonesia, *Peace Corps* pada awal pembentukannya berjalan dari tahun 1963-1965 namun berhenti karena ketidakstabilan politik Indonesia tahun 1965.

---

<sup>25</sup> Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas. *Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia Tahun 2016*. (Bappenas: Jakarta). 2016.

Setelah absennya bantuan pembangunan *Peace Corps* di Indonesia selama hampir 40 tahun, program *Peace Corps* kembali dilaksanakan di Indonesia tahun 2010. Relawan-relawan yang dikirimkan dari Amerika Serikat menjalankan misi untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia yaitu dengan mengajar di sekolah dan madrasah. Selain mengajar di madrasah-madrasah, penempatan relawan di Jawa Barat dan Jawa Timur mengindikasikan misi *war on terrorism* yang dikampanyekan Amerika Serikat. Hal ini menarik untuk diteliti kembali bantuan pembangunan *Peace Corps* ke Indonesia sebagai agen pembangunan dengan pemberian bantuan teknis dalam pengajaran Bahasa Inggris dan pelatihan guru dan implementasinya sesuai *Paris Declaration*.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah :

Bagaimana efektivitas bantuan pembangunan *Peace Corps* Amerika Serikat di Indonesia?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami efektivitas *Peace Corps* sebagai agen pembangunan Amerika Serikat di Indonesia.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis, bagi mahasiswa, dosen, masyarakat dan peneliti untuk mendapatkan gambaran dan informasi serta

menjadi bahan masukan bagi pemerintah Indonesia dengan melihat implementasi bantuan pembangunan yang bermanfaat untuk memajukan pembangunan negara.

Selain itu, secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi terutama penstudi Ilmu Hubungan Internasional, yang berniat lebih dalam untuk mengetahui implementasi agen pembangunan.

## 1.6 Studi Pustaka

Dalam menganalisis topik penelitian, peneliti menggunakan lima kajian pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu akan menjadi tolak ukur dan landasan bagi penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian.

Penelitian pertama yaitu penelitian yang ditulis oleh Muhammad Inu Kertapati yang berjudul “*Peace Corps: Misi Perdamaian Amerika Serikat di Indonesia 1963-1965.*”<sup>26</sup> Lahirnya *Peace Corps* memiliki faktor internal dan eksternal yang dapat menjelaskannya. Amerika Serikat pada tahun 1960an memiliki jumlah penduduk dengan usia remaja-dewasa yang sangat tinggi sebagai akibat dari peningkatan angka kelahiran (*baby boom*) pascaperang Dunia II. Para remaja dan orang dewasa yang mayoritasnya menempuh pendidikan di universitas akan menambah jumlah pekerja dan akan menimbulkan kemungkinan pengangguran. Pemerintah Amerika Serikat melihat bahwa hal ini perlu dicegah dengan membuat suatu badan yang dapat

---

<sup>26</sup> Muhammad Inu Kertapati. *Peace Corps : Misi Perdamaian Amerika Serikat di Indonesia 1963-1965.* (Skripsi: Universitas Indonesia). 2011.

menampung gagasan dan keahlian para pemuda-pemudi Amerika Serikat, salah satunya dengan pembentukan agen pembangunan *Peace Corps*.

Kesepakatan Indonesia dengan Amerika Serikat mengenai *Peace Corps* dilihat memiliki nilai-nilai politis karena dilaksanakan pada masa Perang Dingin untuk membendung pengaruh komunis. Para sukarelawan *Peace Corps* di Indonesia melakukan pelatihan olahraga mulai dari baseball, atletik, renang, tinju dan pendidikan jasmani hanya untuk membantu rakyat Indonesia dalam mempersiapkan diri pada kejuaraan olahraga nasional dan internasional pada tahun 1963 dan 1964.

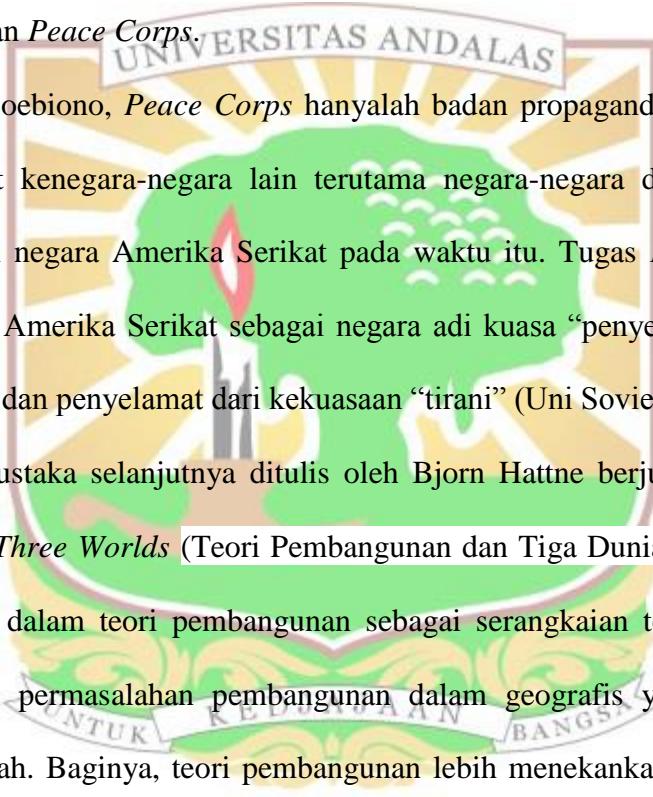
Perbedaan penelitian ini dengan “*Peace Corps: Misi Perdamaian Amerika Serikat di Indonesia 1963-1965*” adalah skripsi tersebut melihat perkembangan *Peace Corps* dari sisi sejarahnya dan hanya mencangkupi misi perdamaian *Peace Corps* di Indonesia tahun 1963-1965.

Kajian pustaka selanjutnya ditulis oleh Umi Prahasuti Soebiono berjudul “*‘Peace Corps’ Salah Satu Strategi Kebijaksanaan Luar Negeri Pada Masa J.F. Kennedy Dalam Politik Pembendungan 1960-1963*”.<sup>27</sup> Pada tahun 1950, Amerika Serikat mengadaptasi strategi *global containment* yang masih terus berlanjut pada masa pemerintahan J.F. Kennedy. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat melihat juga pada kepentingan nasionalnya dengan mewujudkan cita-cita terciptanya perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia. Kebijakan politik, ekonomi, dan kebijakan militer dalam negeri, dipakai sebagai strategi dasar kebijakan politik luar negeri J. F. Kennedy.

---

<sup>27</sup> Umi Prahasuti Soebiono. ‘*Peace corps’ salah satu strategi kebijaksanaan luar negeri pada masa J.F. Kennedy dalam politik pembendungan 1960-1963*, (Tesis: Universitas Indonesia). 2014.

Gagasan *Peace Corps* sebagai strategi luar negeri pada masa J.F. Kennedy timbul akibat dari keadaan politik dalam negeri dan keadaan politik luar negeri Amerika Serikat pada saat itu. Keinginan Kennedy hendak memberikan kebijakan yang bermanfaat bagi pemerintah Amerika Serikat untuk memecahkan kesulitan guna menghadapi Uni Soviet dan kemelut dalam negeri menghadapi gerakan perjuangan *civil right* maupun mengatasi gejolak generasi muda hasil dari *baby boom* dengan membentuk badan *Peace Corps*.



Menurut Soebiono, *Peace Corps* hanyalah badan propaganda dari pemerintah Amerika Serikat kenegara-negara lain terutama negara-negara dunia ketiga yang belum mengenal negara Amerika Serikat pada waktu itu. Tugas *Peace Corps* juga mempopulerkan Amerika Serikat sebagai negara adi kuasa “penyelamat dunia” dari keterbelakangan dan penyelamat dari kekuasaan “tirani” (Uni Soviet).

Kajian pustaka selanjutnya ditulis oleh Bjorn Hattne berjudul *Development Theory and the Three Worlds* (Teori Pembangunan dan Tiga Dunia)<sup>28</sup>. Karya Hattne ini melihat tren dalam teori pembangunan sebagai serangkaian teori yang relevan untuk memahami permasalahan pembangunan dalam geografis yang berbeda dan konteks bersejarah. Baginya, teori pembangunan lebih menekankan pada perubahan dalam didisplin ilmu politik, ekonomi dan sosiologi. Perubahan tersebut menyebabkan transformasi pada budaya, politik, sosial dan ekonomi. Pembangunan melibatkan tiga hal yaitu *development theories*, *development strategies* dan *development ideologies*.

---

<sup>28</sup> Bjorn Hettne, *Development Theory And Third World*. (SAREC Report No.2). (Stockholm: Swedish Agency For Research Cooperation With Developing Countries. 1982).

*Development Theory and the Three Worlds* menurut Hettne merupakan tinjauan menyeluruh atas teori ilmu sosial yang relevan untuk memahami masalah pembangunan, dalam konteks historis dan geografis yang berbeda. Sejarah pemikiran pembangunan ini meliputi dunia pertama (negara industri barat), dunia kedua (negara sosialis), dan dunia ketiga (negara berkembang). Pembahasan dimulai dengan teori pembangunan awal, terutama yang berasal dari Eropa. Kemudian dijelaskan bagaimana teori tersebut diperkaya, ditantang, serta diubah untuk menanggapi realitas dunia ketiga.



Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rekso Graha dan Suzie S Sudarman dengan judul “Program *Peace Corps*: Implementasi *Smart Power* Pemerintah Amerika Serikat di Indonesia.”<sup>29</sup> Penelitian ini menelusuri latar belakang inisiatif *smart power* di Amerika Serikat dan mengungkap kehadiran kembali bantuan pembangunan *Peace Corps* di Indonesia. Kondisi domestik Indonesia yang tercermin dari konflik ekosistem, kemungkinan digunakannya *soft power* sebagai awal dari penggunaan *hard power* Amerika Serikat di Indonesia dan dilema dominasi yang dihadapi Amerika Serikat dalam politik di dunia merupakan motivasi utama di balik peluncuran *Peace Corps* di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu implementasi *smart power* di Indonesia pada tahun 2010-2011. *Smart power* Amerika Serikat mengajarkan bagaimana sumber daya yang dimiliki perlu disesuaikan dengan konteks yang tepat untuk memperoleh hasil secara maksimal.

<sup>29</sup> Rekso Graha dan Suzie S Sudarman, “Program *Peace Corps*: Implementasi *Smart Power* Pemerintah Amerika Serikat di Indonesia” Prisma, Vol. 35. No. 1, 2016

Gagasan tentang *Intergovernmental Relations*, keberadaan *Joint Steering Committee* dan *Working Group* agen pembangunan *Peace Corps* di Indonesia, serta adanya mitra koalisi di antara agensi kedua pemerintahan memperlihatkan bagaimana bantuan pembangunan *Peace Corps* di Jawa Timur tahun 2010-2011 merupakan salah satu bentuk implementasi *smart power* Amerika Serikat di Indonesia. Dalam hal itu, Pemerintah Amerika Serikat berhasil meletakkan dasar-dasar format persekutuan dengan mitra koalisi di tingkat kementerian negara, pejabat senior eselon satu, pejabat eselon dua, dan komunitas lokal, pada tahun-tahun awal pelaksanaan bantuan pembangunan *Peace Corps* di Indonesia.



Kajian pustaka selanjutnya ditulis oleh Shaka Mahottama berjudul *Analisis Terhadap Implementasi Bantuan World Bank Dalam Menekan Angka Kemiskinan di Indonesia Periode 2000-2010*. Penelitian ini membahas komitmen negara-negara di dunia untuk memberantas kemiskinan dan permasalahan lain yang terkait melalui *Millenium Development Goals (MDGs)*. Pemerintah Indonesia mengklaim keberhasilan program pengentasan kemiskinan dengan PNPM-Mandiri. Program ini ternyata didanai oleh World Bank.

Mahottama mengukur efektivitas bantuan World Bank berdasarkan poin-poin *Paris Declaration* yang terdiri dari lima prinsip yaitu (1) kepemilikan kebijakan, (2) keselarasan lokal, (3) harmonisasi, (4) pengelolaan berorientasi hasil pembangunan, dan (5) pertanggungjawaban bersama. Menurut Mahottama, bantuan dari World Bank tidak efektif dalam usaha penanggulangan kemiskinan berdasarkan analisis *Paris Declaration*.

Setelah melihat beberapa penelitian di atas, penulis menemukan relevansi antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Relevansinya antara lain, yaitu penulis juga akan melihat bagaimana aktivitas *Peace Corps* di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, serta pengguna konsep bantuan pembangunan sebagai poin utama dalam beragam topik pembahasan dalam penelitian-penelitian tersebut. Dengan melihat relevansinya, penelitian-penelitian di atas sangat cocok dan relevan untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini penulis akan mencoba membahas bagaimana efektivitas bantuan pembangunan *Peace Corps* Amerika Serikat di Indonesia.

## 1.7 Kerangka Pemikiran

### 1.7.1 Bantuan Luar Negeri (*Foreign Aid*)

Salah satu pelaksanaan kerja sama internasional yaitu pemberian bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri atau *foreign aid* didefinisikan sebagai semua jenis bantuan yang diberikan oleh negara atau lembaga donor internasional, baik berupa pinjaman atau hibah dengan persyaratan tertentu.<sup>30</sup> Bantuan ini tidak hanya terbatas dalam bentuk material kebendaan saja, namun juga bisa disalurkan dalam bentuk jasa.

Secara umum, K.J. Holsti mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai pemindahan dana, barang atau nasehat teknis dari satu negara donor kepada negara

---

<sup>30</sup> John D. White, "The Politics of Foreign Aid". (Sydney: The Bodley Head. London. 1974). Hal 188

penerima yang merupakan suatu sarana kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad.<sup>31</sup>

Bantuan luar negeri tersebut digolongkan ke dalam tiga jenis bantuan, yaitu:<sup>32</sup>

1. Bantuan Program (*Program Aid*)

Bantuan Program (*Program Aid*) adalah bantuan berupa devisa yang diperlukan untuk menutup kekosongan neraca pembayaran, yang digunakan untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan masyarakat, seperti bantuan pangan dan komoditas.

2. Bantuan Proyek (*Project Aid*)

*Project Aid* adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintahan berupa valuta asing yang ditukarkan ke dalam mata uang negara penerima. Bantuan ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan proyek-proyek pembangunan baik dalam rangka rehabilitasi, pengadaan barang atau peralatan dan jasa, serta perluasan atau pengembangan proyek-proyek pembangunan baru.

3. Bantuan Teknik (*Technical Assistance*)

Bantuan yang diberikan adalah berupa tenaga ahli, pelatihan, dan peralatan. Inti dari bantuan teknik ini adalah penyediaan ahli teknologi, yakni dengan mengisi kekosongan dalam bidang-bidang

---

<sup>31</sup> K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Analisa*. terj. Efin Sudrajat dkk. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987)

<sup>32</sup> Biro Perencanaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. *Peluang dan Prosedur Pemanfaatan Bantuan Luar Negeri*. 1999. hal 4

keahlian tertentu dan sekaligus memindahkan keahlian para tenaga ahli internasional kepada tenaga kerja di dalam negeri.

*Technical assistance* berkaitan dengan pembentukan kerja sama teknis (*technical cooperation*) antara pendonor dan negara penerima.<sup>33</sup> Kerja sama bantuan teknis merupakan bantuan yang melibatkan para ahli dalam merancang dan mengimplementasikan program-program intervensi yang bertujuan untuk menangani masalah di lapangan, serta bertujuan untuk meningkatkan atau mempromosikan pembangunan.<sup>34</sup> Program-program *technical assistance* atau *technical cooperation*, selain sebagai bantuan atau alat untuk merespon masalah humaniter dan sosial-ekonomi, arah program-program yang dirancang juga berkaitan dengan advokasi pembentukan atau peningkatan pelaksanaan kebijakan terkait pendidikan, regulasi keamanan untuk pekerja, hasil produksi dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

Secara historis, kebanyakan bantuan luar negeri telah diberikan sebagai bantuan bilateral langsung dari satu negara ke negara lain. Para donor juga memberikan bantuan secara tidak langsung sebagai bantuan multilateral, yang sumber dayanya berasal dari beberapa donor.<sup>36</sup> Terkait dengan kebijakan luar negeri yang memiliki nilai kepentingan negara, maka salah satu bentuk kebijakan itu dapat dituangkan dalam bentuk bantuan luar negeri.<sup>37</sup> Sejarah bantuan luar negeri Amerika

<sup>33</sup> Prema Vipassani. *Upaya ILO-IPEC Melalui WACAP dalam Mengeliminasi dan Mencegah Pekerja Anak pada Perkebunan Kakao di Ghana*. (Skripsi: Universitas Udayana). 2015.

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Van der Veen, Ideas, Interest and Foreign Aid (Cambridge: Cambridge University Press, 2011)

<sup>36</sup> Steven Radelet. "A Primer for Foreign Aid". (Working paper No.92. 2006). hal. 4

<sup>37</sup> World Bank. "Assessing Aid: What Works, What doesn't, and Why". A World bank Policy Research Report. (Oxford: Oxford University Press. 1998). hal 7

Serikat dimulai ketika Perang Dunia II berakhir, yang dahulu digunakan untuk merekonstruksi ekonomi Eropa melalui *Marshal Plan* dan *Truman Program*. Program Truman tersebut disampaikan pada pidato tahunan presiden tahun 1949.<sup>38</sup>

Bantuan luar negeri dalam tujuan pembangunan berhubungan dengan pembangunan ekonomi karena berorientasi materi namun pembangunan sering dikaitkan secara menyeluruh dan multidisipliner dengan pembangunan manusia serta daya saing, kualitas hidup, atau kesejahteraan subjektif.<sup>39</sup> Bantuan pembangunan internasional secara khusus terdiri atas lembaga dan kebijakan yang muncul setelah Perang Dunia II. Lembaga-lembaga ini bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan memperbaiki standar hidup di negara-negara yang sebelumnya terjajah.<sup>40</sup>

Bantuan pembangunan berasumsi bahwa memperbaiki atau meningkatkan kehidupan manusia akan lebih membawa dampak kesejahteraan dan kemakmuran dibandingkan dengan bantuan untuk meningkatkan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi saja. Bantuan luar negeri untuk pembangunan percaya bahwa pertumbuhan pendapatan hanyalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk membangun dan membentuk kehidupan manusia, bukan sebagai tujuan dari pembangunan (*development*).<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. 2004. “Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat” Hal 168

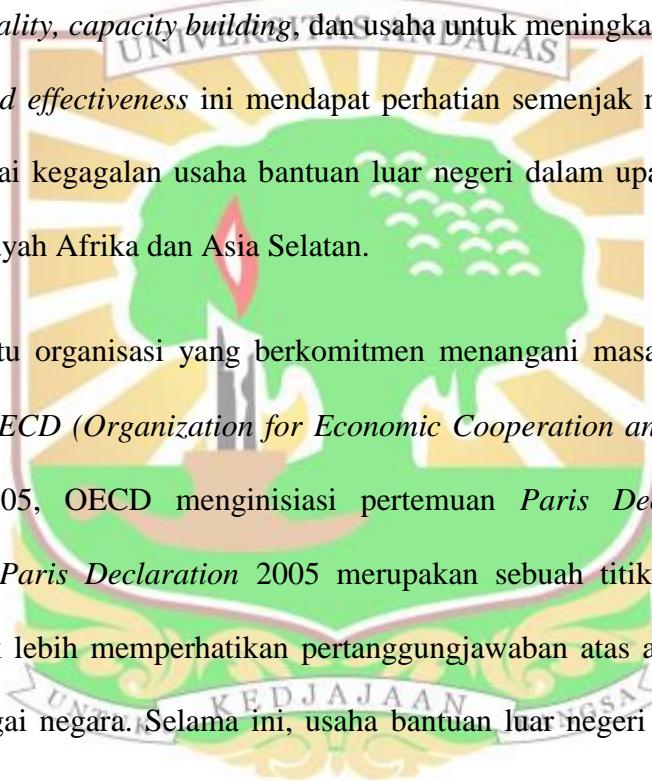
<sup>39</sup> Video Hans Rosling, <https://www.gapminder.org/videos/human-rights-democracy-statistics/> (diakses 4 Februari 2017)

<sup>40</sup> Blackwell Wiley. “Dictionary of Human Geography, 5th Edition”. (Development. In D. Gregory. 2009).

<sup>41</sup> Ibid.

### 1.7.2 Efektivitas Bantuan (*Aid Effectiveness*)

*Aid Effectiveness* secara sederhana dapat diartikan sebagai efektifitas bantuan pembangunan (*development aid*) dalam mencapai pembangunan manusia dan ekonomi, atau juga dapat diartikan sebagai target-target pembangunan.<sup>42</sup> Agensi-agensi donor dan lembaga-lembaga *think tank* internasional terus menerus mencari cara-cara baru untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas bantuan, termasuk dalam *conditionality*, *capacity building*, dan usaha untuk meningkatkan *governance*.<sup>43</sup> Isu mengenai *aid effectiveness* ini mendapat perhatian semenjak munculnya banyak laporan mengenai kegagalan usaha bantuan luar negeri dalam upaya pembangunan, terutama di wilayah Afrika dan Asia Selatan.



Salah satu organisasi yang berkomitmen menangani masalah bantuan luar negeri adalah *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)*.<sup>44</sup> Pada tahun 2005, *OECD* menginisiasi pertemuan *Paris Declaration on Aid Effectiveness*.<sup>45</sup> *Paris Declaration* 2005 merupakan sebuah titik tolak munculnya kesadaran untuk lebih memperhatikan pertanggungjawaban atas aliran bantuan luar negeri di berbagai negara. Selama ini, usaha bantuan luar negeri seringkali dikritik tidak efektif dan hanya akan berfungsi sebagai alat pihak donor dalam mencapai tujuannya di negara penerima.

<sup>42</sup> Shaka Mahottama, *Analisis Terhadap Implementasi Bantuan World Bank Dalam menekan Angka Kemiskinan di Indonesia Periode 2000-2010*. (Tesis: Universitas Indonesia). 2012.

<sup>43</sup> D. Kauffman. “Aid Effectiveness and Governance: The good, the bad, and the Ugly”, World Bank Outreach. (February 2009).

<sup>44</sup> Tentang *OECD* <http://www.oecd.org/about/> (diakses tanggal 6 April 2017)

<sup>45</sup> Paris Declaration and Accra Agenda for Action, <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm> (diakses tanggal 6 April 2017).

Indonesia menjadi pihak yang ikut menandatangani *Paris Declaration* dan berkomitmen untuk mematuhi deklarasi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu upaya komitmen Indonesia adalah dengan dibuatnya *Jakarta Commitment* yang merupakan tindak lanjut atas *Paris Declaration Monitoring Survey* dari *Paris Declaration on Aid Effectiveness* pada tahun 2005.<sup>46</sup> Dalam *Jakarta Commitment*, pemerintah Indonesia kembali menekankan pentingnya bantuan atau asistensi dari pihak luar dalam usaha pembangunan.

Pertemuan ini mengumumkan lima prinsip dasar *aid effectiveness*, yaitu:<sup>47</sup>

1. Kepemilikan Kebijakan (*Policy Ownership*), yang mengharuskan bagi negara berkembang untuk memiliki kebijakan dan strategi pembangunannya sendiri, serta mengelola usaha pembangunan mereka di lapangan.
2. Keselarasan Lokal (*Local Alignment*), yang mengharapkan bagi para pendonor untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebijakan dan strategi pembangunan negara berkembang, dan apabila memungkinkan harus selalu memprioritaskan lembaga dan institusi lokal dalam pengelolaan bantuan.
3. Harmonisasi (*Harmonization*), yang mewajibkan bagi para donor untuk melakukan koordinasi dalam pemberian bantuan kepada negara berkembang, agar bantuan yang ada tidak tumpang tindih dan menyusahkan pemerintah negara penerima bantuan.

---

<sup>46</sup> U. Hanik. *The Analysis of the Development and Alignment of Aid Monitoring and Evaluation Policy for the Effectiveness of National Development Fund: A Case Study of Indonesia, Post-Paris Declaration Agreement*. (Tesis: Universitas Indonesia). 2010.

<sup>47</sup> Joint Evaluation of Paris Declaration. Phase 2: Final Report. 2010.

- 
4. Pengelolaan Berbasis Hasil Pembangunan (*Managing For Results*), yang mewajibkan semua pihak yang berpartisipasi dalam bantuan untuk mengutamakan dan memperhatikan hasil dari bantuan tersebut, tidak hanya sekedar penyaluran teknis, melainkan mengembangkan metode, alat dan mekanisme untuk mengetahui apakah bantuan tersebut benar-benar memiliki hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat penerima.
  5. Pertanggungjawaban Bersama (*Mutual Accountability*), para donor dan negara berkembang harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan pelaksanaan bantuan secara transparan satu sama lain, kepada masyarakat, serat parlemen, mengenai dampak dan hasil dari bantuan tersebut.

Kelima prinsip *Paris Declaration on Aid Effectiveness* kemudian dilengkapi dengan 12 indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis apakah implementasi prinsip-prinsip tersebut terpenuhi. Indikator-indikator yang terdapat dalam prinsip-prinsip *Paris Declaration on Aid Effectiveness* menjadi tolak ukur usaha bantuan pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara donor kepada negara-negara penerima. Tujuannya agar terjadi bantuan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Berikut prinsip beserta indikator *Paris Declaration on Aid Effectiveness* yang dapat dilihat di Tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Prinsip-prinsip *Paris Declaration***

No	Prinsip <i>Paris Declaration</i>	Indikator	Parameter
1	Kepemilikan Kebijakan ( <i>Policy Ownership</i> )	1.1 Kepemilikan strategi yang bersifat operasional.	Kemandirian negara penerima bantuan dengan menunjukkan kemampuannya untuk menentukan sendiri strategi dan arah pembangunan sesuai kepentingan dan kebutuhannya.
2	Keselarasan Lokal ( <i>Local Alignment</i> )	<p>2.1 Terdapatnya penguatan kapasitas lokal melalui koordinasi dukungan. Menghindari implementasi program yang tumpang tindih.</p> <p>2.2 Terdapatnya sistem manajemen keuangan publik dan <i>procurement</i> yang dapat diandalkan.</p> <p>2.3 Adanya penggunaan sistem manajemen keuangan publik dan <i>procurement</i> nasional.</p> <p>2.4 Kepastian bahwa aliran bantuan mengutamakan prioritas nasional.</p> <p>2.5 Bantuan memiliki sifat mudah diprediksi.</p> <p>2.6 Bantuan bersifat tidak mengikat, minim <i>conditionalities</i>.</p>	Negara tidak terikat dan tidak serta merta bergantung kepada donor yaitu dengan mendahulukan kepentingan lokal.
3	Harmonisasi ( <i>Harmonization</i> )	<p>3.1 Adanya prosedur umum dalam aliran bantuan luar negeri.</p> <p>3.2 Adanya <i>joint mission</i> dan <i>joint country analytic works</i>.</p>	Adanya koordinasi dukungan dalam pemberian bantuan agar bantuan tidak tumpang tindih.

4	Pengelolaan yang berorientasi pada hasil pembangunan ( <i>Managing for results</i> )	4.1 Adanya kerangka kerja yang berorientasi pada hasil-hasil pembangunan.	Setiap program dan evaluasinya mengacu kepada hasil pembangunan di mana masyarakat dapat menikmati hasil dan program pembangunannya tersebut dengan dibentuknya kerangka pengelolaan hasil pembangunan.
5	Pertanggungjawaban bersama ( <i>Mutual Accountability</i> )	5.1 Adanya mekanisme pertanggungjawaban bersama antara pemerintah dan donor, terutama dalam hasil-hasil pembangunan.	Adanya pertanggungjawaban dengan diterbitkannya laporan dalam rentang waktu tertentu.

Sumber: *Survey on Monitoring the Paris Declaration, Making Aid More Effective*

2010

Prinsip dan indikator yang terdapat dalam *Paris Declaration on Aid Effectiveness* akan digunakan dalam bab pembahasan dalam penelitian mengenai efektivitas bantuan pembangunan *Peace Corps* di Indonesia.

## 1.8 Metodologi Penelitian

### 1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>48</sup> Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis

<sup>48</sup> John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 4<sup>th</sup> Edition*. (California, SAGE Publication: 2013), hal. 4.

data secara induktif dan menafsirkan makna dari data yang telah didapatkan.<sup>49</sup> Dengan menggunakan metode penulisan deskriptif, peneliti mencoba menggambarkan bagaimana implementasi bantuan pembangunan *Peace Corps* Amerika Serikat di Indonesia. Penggunaan metode penulisan deskriptif ditujukan agar dapat menggambarkan dan menyampaikan masalah yang diteliti secara cermat dan lengkap.

### 1.8.2 Batasan Masalah

Batasan waktu yang digunakan untuk menganalisis implementasi bantuan pembangunan *Peace Corps* Amerika Serikat di Indonesia yaitu tahun 2010 yang merupakan tahun peresmian kembalinya *Peace Corps* di Indonesia dengan ditanda tanganinya *Memorandum of Understanding* oleh kedua pihak sampai tahun 2017 dimana wawancara dan penelitian dilakukan.

### 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis di dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *Peace Corps*, yang merupakan objek yang perlakunya hendak dideskripsikan dan dijelaskan.<sup>50</sup> Unit eksplanasinya adalah Indonesia sebagai negara yang menerima bantuan pembangunan, yang merupakan objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang akan digunakan.<sup>51</sup> Sedangkan tingkat analisisnya adalah pada tingkat negara.

---

<sup>49</sup> Ibid, 4-5.

<sup>50</sup> Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional Displin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 35.

<sup>51</sup> Ibid.

#### 1.8.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan data primer berupa wawancara dengan relawan dan staf *Peace Corps* Indonesia. Sedangkan data sekunder berupa observasi terhadap *Peace Corps* melalui laporan tahunan dan situs resminya <https://www.peacecorps.gov/> dan <https://www.peacecorps.gov/indonesia/>, *Peace Corps* di media sosial seperti facebook dan twitter berita-berita, artikel, jurnal dan dokumen serta publikasi-publikasi yang dikeluarkan oleh *Department of State* Amerika Serikat, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta media-media online dan cetak.

Peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan analisa dokumen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bisa dalam bentuk tidak terstruktur dan terstruktur. Diharapkan dengan wawancara ini, objek penelitian akan dapat dimengerti secara mendalam dalam mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya.<sup>52</sup> Wawancara akan dilakukan di Kota Surabaya sebagai lokasi kantor *Peace Corps* Indonesia. Penentuan informan kunci yang berasal dari *Peace Corps Indonesia* (*Peace Corps Indonesia Regional Manager*, *Peace Corps Volunteers*), institusi pemerintahan (Direktorat Politik dan Komunikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), serta guru dan siswa/siswi SMA/MA/SMK penempatan relawan *Peace Corps*.

---

<sup>52</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) hal 230.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.<sup>53</sup> Di dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan akan dipilah-pilah dan diinterpretasikan sehingga mendapatkan sumber-sumber relevan yang dapat menjelaskan isu yang dibahas penulis.

## 1.9 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

### BAB II INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN

Bab ini menjelaskan kondisi pembangunan Indonesia yang menarik keinginan negara lain memberikan bantuan pembangunan kepada Indonesia.

### BAB III PEACE CORPS DAN KEHADIRANNYA DI INDONESIA

Bab ini menggambarkan *Peace Corps* sebagai agen pembangunan Amerika Serikat terhadap negara-negara berkembang. Bab ini juga menjelaskan implementasi *Peace Corps* di Indonesia. Mulai dari awal pembentukannya di 1963 dan diberhentikan tahun 1965 kemudian dilaksanakan kembali tahun 2010 sampai 2017.

<sup>53</sup> Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research*, (California: Sage Publications Inc, 1999), 150.

## **BAB IV EFEKTIVITAS BANTUAN PEMBANGUNAN *PEACE CORPS* AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA**

Bab ini menganalisis efektivitas bantuan pembangunan Amerika Serikat melalui *Peace Corps* di Indonesia tahun 2010-2017. Dalam bab ini penulis akan menghubungkan temuan data dengan konsep yang digunakan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

